

FORMULASI KEBIJAKAN PEMINDAHAN LOKASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LINGGA DI KECAMATAN SENAYANG

¹Romy Subanu, ²Yusri Munaf

¹Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

²Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

²Corresponding Author: yusri.ip@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

The relocation of the Department of Marine Affairs and Fisheries of Lingga Regency to the Senayang District received the attention of the community, therefore it is interesting to review from a policy point of view. The purpose of this study was to understand the policy formulation of the relocation of the Department of Marine Affairs and Fisheries of Lingga Regency to Senayang District from the point of view of a goal-oriented model. The type of research selected is qualitative-descriptive. The location of this research is the Department of Marine Affairs and Fisheries of Lingga Regency, which at this time has changed the nomenclature to the Department of Fisheries of Lingga Regency Service. Informants were selected purposively and snowball sampling. Primary data is obtained directly from informants through interviews and secondary data comes from related documents. The results showed that the policy formulation for relocating the Department of Marine Affairs and Fisheries of Lingga Regency to the Senayang District did not support resource management to achieve the goal because most of the resources were not available. In addition, the goal to be achieved ~ namely providing easy access and services to fishing communities in Senayang District ~ does not meet the criteria as a good goal.

Keywords: policy formulation, government, service.

INTRODUCTION

Kabupaten Lingga adalah salah satu kabupaten di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berciri kepulauan¹. Kabupaten Lingga memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas daripada daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. Kabupaten Lingga memiliki luas wilayah mencapai 45.667,56 km² dengan luas daratan 2.235,48 km² dan lautan 43.432,08 km². Wilayahnya terdiri dari 604 buah pulau besar dan kecil. Tidak kurang dari 86 buah diantaranya sudah dihuni, sedangkan sisanya 518 buah belum berpenghuni. Pulau Singkep, Pulau Lingga, dan Pulau Sebangka adalah tiga terbesar di Kabupaten Lingga.

Kabupaten Lingga terdiri dari 10 kecamatan, yaitu: Kecamatan Singkep, Kecamatan Lingga, Kecamatan Senayang, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Singkep Pesisir, Kecamatan Singkep Selatan, Kecamatan Lingga Utara, Kecamatan Lingga Timur, Kecamatan Selayar, dan Kecamatan Kepulauan Posek.² Wilayah Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Singkep Selatan, dan Kecamatan Singkep Pesisir berada di Pulau Singkep; wilayah Kecamatan Lingga, Kecamatan Lingga Utara, dan Kecamatan Lingga Timur berada di Pulau Lingga; Sementara itu, Kecamatan Selayar, Kecamatan Senayang, dan Kecamatan Kepulauan Posek menempati pulau tersendiri terpisah dari Pulau Singkep dan Pulau Lingga.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Ibu Kota Kabupaten Lingga berkedudukan di Daik Lingga (di Pulau Lingga). Penempatan ibu kota Kabupaten Lingga di Daik Lingga bukan tanpa alasan. Sebagaimana diketahui bersama, Kebudayaan Lingga telah ada sejak beberapa abad silam sebagai Kerajaan Melayu Lingga yang mendapat julukan sebagai “Negeri Bunda Tanah Melayu”. Pada kurunwaktu 1722-1911, terdapat dua Kerajaan Melayu yang berkuasa dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaannya berada di Daik Lingga dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan.³ Faktor sejarah ini merupakan salah satu faktor dipilihnya Daik Lingga sebagai ibu kota Kabupaten Lingga.

Sebagai ibu kota, Daik Lingga menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Lingga. Sebagian besar perangkat daerah berada di Daik Lingga, kecuali Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian, dan Badan Pendapatan Daerah yang berada di Dabo Singkep (di Pulau Singkep).

Pada awal bulan April 2017, Bupati Lingga memindahkan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga dari ibu kota kabupaten ke Kecamatan Senayang (Pulau Senayang) dan kemudian pada bulan April 2018 lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga dipindahkan lagi dari Pulau Senayang ke Pulau Sebangka (masih di dalam Kecamatan Senayang). Alasan pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang dapat diringkas menjadi tiga alasan utama, yaitu: 1) sebagai strategi mempercepat pembangunan sektor kemaritiman di Kecamatan Senayang; untuk memacu kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga dalam mengoptimalkan potensi perikanan di Kecamatan Senayang; agar lebih dekat dengan masyarakat nelayan yang berada di Kecamatan Senayang.

Pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan mendapat sorotan dari masyarakat. Zakaria, salah seorang anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga, mengatakan, “Pemindahan kantor ke wilayah Senayang masih terbilang belum sesuai dengan kondisi saat ini.” Karena mendapat sorotan masyarakat, pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan menarik untuk dikaji dari sudut pandang kebijakan.

Pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang merupakan salah satu bentuk kebijakan, dalam hal ini kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga, sebagaimana yang dapat dipahami dari salah satu pengertian kebijakan yang paling sederhana, yaitu: *action taken by government* (Ira Sharkansky). Menurut Widodo, secara teknis kebijakan publik hanya dibedakan dalam tiga tahapan, yaitu 1) *policy formulation*, 2) *policy implementation*, dan 3) *policy evaluation*. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, dan dana yang dimiliki, maka pada penelitian ini peneliti menetapkan fokus masalah pada *policy formulation* dari kebijakan pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang.

Menurut Nugroho, dalam perumusan kebijakan (*policy formulation*) selain menggunakan *problem-oriented model* seperti model kelembagaan (*institutional*), model proses (*process*), model kelompok (*group*), model elit (*elite*), modal rasional (*rational*), modal inkremental (*incremental*), model teori permainan (*game theory*), modal pilihan publik (*public choice*), model sistem (*system*), model pengamatan terpadu (*mixed scanning*), model demokratis, model strategis, model deliberatif, dan model “tong sampah” (*garbage can*), dapat juga digunakan model *goal oriented* sebagai alternatif. Perumusan kebijakan yang *goal oriented* mencakup beberapa kegiatan, yaitu: 1) menetapkan tujuan yang hendak dicapai, 2) memastikan sumberdaya yang tersedia, dan 3) merumuskan kebijakan.

Formulasi kebijakan adalah tahap mengidentifikasi dan mensahkantindakan yang relevan dan dapat diterima dalam menangani beberapa masalah publik. Lester dan Stewart dalam Mulyadi¹⁹ menyatakan bahwa formulasi kebijakan adalah *the stage of the policy process where pertinent and acceptable courses of action for dealing with some particular public problem are identified and enacted into a law* (tahap proses kebijakan di mana tindakan yang relevan dan dapat diterima untuk menangani beberapa masalah publik tertentu diidentifikasi dan disahkan menjadi undang-undang). Formulasi sebagai sebuah 'formula' digunakan untuk mengembangkan rencana, metode, resep untuk mengatasi masalah.

Jones dalam Mulyadi, *formulation is derivative of formula and means simply to develop a plan, a method, a prescription, in this chase for alleviating some need, for acting on a problem* (formulasi adalah turunan dari formula dan berarti hanya untuk mengembangkan rencana, metode, resep, dalam mengejar untuk mengurangi beberapa kebutuhan, untuk bertindak atas masalah).

Mustopadidjaja AR dalam Mulyadi menyatakan bahwa secara teknistahapan formulasi kebijakan meliputi: 1) Pengkajian masalah kebijakan; 2) Penentuan tujuan; 3) Pengembangan alternatif; 4) Pembuatan model; 5) Penentuan kriteria penilaian; 6) Penilaian alternatif; 7) Perumusan rekomendasi. Menurut Widodo, dalam *policy formulation*, paling tidak terdapat empat macam kegiatan atau tahapan yang harus dilalui, yaitu: *problem identification, agenda setting, policy problem formulation, dan policy design*. Pada tahap *problem identification*, dilakukan pencermatan dan pengenalan (*scanning*) terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan internal dan eksternal, dampak dari perubahan-perubahan tersebut, dan masalah-masalah yang timbul akibat dampak dari perubahan lingkungan tersebut sebagaimana diilustrasikan pada gambar di bawah ini.

Tahap *agenda setting*, pada dasarnya yang dilakukan adalah bagaimana membuat masalah publik (*public problems*) menjadi masalah kebijakan (*policy problems*). Tidak semua masalah publik akan menjadi masalah kebijakan. Hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusinya yang bisa tampil menjadi masalah kebijakan. Tidak semua masalah atau isu akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Isu-isu atau masalah tersebut harus berkompetisi antara satu sama lain dan akhirnya hanya masalah-masalah tertentu saja yang akan menang dan masuk ke dalam agenda kebijakan.

Untuk menjadi masalah kebijakan, tidak cukup suatu masalah publik hanyadianggap oleh banyak orang sebagai masalah, tetapi perlu adanya *political will* dari masyarakat untuk memperjuangkan agar masalah publik tersebut menjadi masalah kebijakan dan –yang paling penting– ditanggapi positif oleh pembuat kebijakan yang kemudian bersedia memperjuangkan masalah itu menjadi masalah kebijakan, memasukkan ke dalam agenda pemerintah, dan mengusahakannya menjadi kebijakan publik.

Widodo, “masalah publik akan mudah tampil menjadi kebijakan publik jika masalah publik tadi: 1) dinilai penting dan membawa dampak yang besar pada banyak orang; 2) mendapatkan perhatian dari para *policy maker*; 3) sesuai dengan platform politik (program politik); dan 4) kemungkinan besar dapat dipecahkan.” Anderson menyebutkan proses penyusunan agenda kebijakan (*policy agenda*) secara runtut terdiri dari: a) *private problems*, b) *public problems*, c) *issues*, d) *systemic agenda*, dan e) *institutional agenda* yang dapat diilustrasikan.

Menurut Mustofadidjaja, terdapat tujuh langkah dalam analisis kebijakan, yaitu: 1) tahap pengkajian persoalan, 2) penetapan tujuan dan sasaran kebijakan, 3) penyusunan model, 4) perumusan alternatif kebijakan, 5) penentuan kriteria pemilihan alternatif kebijakan, 6) penilaian alternatif kebijakan, 7) perumusan rekomendasi kebijakan.

Menurut Nugroho, formulasi kebijakan yang telah diuraikan di atas termasuk model *problem oriented*. Sementara itu ada lagi sebuah model formulasi kebijakan yang *goal oriented*. Menurut Nugroho, perumusan kebijakan yang berorientasi ke tujuan dapat dirinci dalam susunan kegiatan sebagai berikut: 1) tetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu; 2) periksa kecukupan sumberdaya yang tersedia, khususnya waktu, manusia, sistem, dan 3) Susunlah kebijakan yang mendukung pengelolaan sumberdaya tersebut untuk mencapai tujuan.

Berkenaan dengan tujuan yang hendak dicapai, mengacu kepada Suntoro dan Hairi, tujuan yang baik sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria, yaitu: 1) diterima banyak pihak dan mewakili kepentingan mayoritas atau didukung golongan yang kuat dalam masyarakat, 2) rasional yakni tujuan merupakan pilihan terbaik dari beberapa alternatif atau realistis yakni telah mempertimbangkan kedudukan organisasi, peraturan yang berlaku, dan sumber daya yang dimiliki, 3) masuk akal dan mempunyai gambaran yang jelas yakni tujuan dibuat berdasarkan pola pikir yang runtun dan mudah dipahami langkah-langkah pencapaiannya, dan 4) mempunyai orientasi ke depan yakni tujuan dimaksudkan untuk kemajuandaerah dan terletak dalam jangka waktu tertentu.

METHODS

Tipe penelitian yang dipilih adalah kualitatif-deskriptif. Pengertian tentang penelitian kualitatif adalah seperti yang diungkapkan Sugiyono sebagai berikut. Sugiono, “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.”

Di antara tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami makna dan memahami keunikan. Maka alasan dipilihnya metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti ingin mamahami makna dan keunikan dari periswa pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang. Menurut Sugiyono, secara umum ada tiga *level of explanation* dari suatu gejala dalam penelitian kualitatif, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Penelitian ini membahas peristiwa pada tataran deskriptif.

Lokasi penelitian ini di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga (pada saat ini sudah berubah nomenklatur menjadi Dinas Perikanan Kabupaten Lingga). Alasan penetapan lokasi karena peristiwa pemindahan perangkat daerah dari ibu kota kabupaten ke wilayah kecamatan merupakan suatu keunikan yang perlu diteliti secara kualitatif.

RESULT AND DISCUSSION

Penetapan Tujuan yang Hendak Dicapai

Yang menjadi tujuan sehingga dirumuskan kebijakan pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang adalah memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang. Awalnya, untuk sentra perikanan diarahkan awalnya adalah di Kecamatan Senayang dulu pada saat itu. Kenapa di Kecamatan Senayang? Karena pada saat itu kita menginginkan Senayang sebagai pusat perikanan tertama itu. Yang kedua, direncanakan pada saat itu ada Cabang Dinas (Kelautan dan) Perikanan

Provinsi (Kepulauan Riau) yang ada di Senayang, jadi agar memudahkan kolaborasi. Pada intinya seperti itu awalnya.

Tujuannya, salah satunya mungkin ini, supaya pelayanan terhadap masyarakat yang berkepentingan dengan Dinas Perikanan lebih mudah dijangkau, kemudian masyarakat lebih ingin ke kantor karena lebih dekat. Di samping itu juga dekat dengan lokasi yang hampir 100% perikanan, maka pembinaan juga diharapkan lebih baik. Yang kami pahami pada saat itu terkait dengan pelayanan. Pelayanan ini faktor utama yang rentang kendali. Pemandangan itu dimaksudkan mendekatkan kantor Dinas kepada masyarakat yang di Senayang lebih besar masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Jadi, intinya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat nelayan itu sendiri. Saya kira untuk tujuannya untuk pemerataan pelayanan kayaknya. Karena di sana juga belum ada UPT, jadi langsung Dinaslah yang dipindahkan kesana. Sebenarnya tujuan utamanya memang untuk pelayanan, pelayanan bagi nelayan atau yang pengurusan rekom minyak. Ke nelayan lah begitu. Pada intinya dalam rangka mempunyai tujuan pertama memperpendek rentang daripada kendali pelayanan perizinan antara pelaku usaha perikanan dan nelayan yang berada di Kecamatan Senayang dengan Dinas Perikanan itu sendiri.

Karena mayoritas penduduk di Senayang, Senayang ini kan pulau-pulau yang mayoritas penduduknya nelayan. Kemarin lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan di Daik Lingga, jadi masyarakat susah. Intinya, pemindahan ke lokasi untuk memudahkan para nelayan untuk memperoleh fasilitas-fasilitas atau kebutuhan yang mereka butuhkan yang disediakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Semenjak dipindahkan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan ke Senayang ini yang pada mulanya nelayan tidak mengetahui di Dinas Kelautan dan Perikanan ada asuransi nelayan dan bantuan- bantuan yang lain. Semenjak pindah itu masyarakat banyak mengetahuinya sekarang mereka sudah memiliki asuransi, rekom BBM. Banyak hal-hal yang awalnya mereka tidak mendapatkan semenjak pindah ke Kecamatan Senayang itu mereka memperolehnya.

Merupakan kebijakan pimpinan daerah yaitu Bapak Bupati Lingga berkaitan dengan pemerataan pembangunan rentang kendali bahwasanya di Senayang mayoritas nelayan. Maka untuk memudahkan sektor Kelautan dan Perikanan karena potensi perikanan pemahaman beliau bahwa di Senayang mayoritas maka letak lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan dipindahkan ke Senayang.

Sebenarnya memang murni visi dari Pak Bupati Alias Wello untuk memperpendek rentang kendali antara masyarakat nelayan dengan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya berada di Daik Lingga. Ini murni memang konsep dan program dari Pak Bupati bukan dari keinginan masyarakat Kecamatan Senayang yang ada di pulau-pulau. Jadi, tujuan yang hendak dicapai yaitu satu untuk mempermudah masyarakat nelayan pulau-pulau ini berurusan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan yang ada di kabupaten. Karena melihat dari kondisi geografis kabupaten di Singkep dan di Lingga sendiri di Daik itu masyarakat nelayannya yang tersebar memang mayoritasnya ada di seputaran gugusan pulau-pulau di Kecamatan Senayang yang sekarang menjadi empat kecamatan. Saya pikir memang tujuan yang hendak dicapainya hanya itu mungkin untuk mempermudah masyarakat nelayan untuk berurusan ke Dinas Kelautan dan Perikanan.

Kemudahan masyarakat nelayan dalam mengakses program dan kegiatan serta kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan wilayah Kecamatan Senayang khususnya pada sektor perikanan. Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tentu saja dapat diterima dengan baik oleh masyarakat nelayan yang berada di Kecamatan Senayang, tetapi tidak diterima oleh para nelayan yang berada di kecamatan lain.

Kalau dari sisi masyarakat Senayang menyambut baik pada saat itu. Khususnya masyarakat Senayang ya. Karena, pertama, memudahkan pelayanan. Karena masyarakat Senayang itu kan sebagian besar adalah penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan pada saat itu. Tapi ada sebagian dari sisi yang lain dari para nelayan lain selain Kecamatan Senayang agak keberatan karena lokasi yang dituju ke Senayang itu sangatsulit dan butuh biaya yang sangat besar.

Tidak semua pihak bisa menerima karena dengan baradanya kantor di daerah Senayang, maka nelayan-nelayan atau siapapun yang berhubungan/berkepentingan dengan kantor Perikanan di bagian daerah Dabo atau daerah Lingga menjadi jauh untuk berurusan dengan kantor. Jadi mereka juga beberapa pihak tidak bisa menerima juga. Memang tidak sesederhana yang kita bayangkan, ternyata ada yang menyambut baik tapi tidak sedikit juga yang mengeluhkan. Karena rupanyakebiasaan mobilitas orang tidak saja kebutuhan seseorang itu terkadang hanya murni untuk pelayanan persoalan kelautan dan perikanan, tapi jugaada hal-hal lain yang terkait dengan kantor lain yang justru ada yang berpendapat kenapa tidak dikelompokkan terpusat di Daik sehingga mereka juga banyak kemudahan yang mereka dapatkan. Tapi tentu ada juga yang memang menyetujui senang dengan lebih dekat. Jadi, memang ada dua pendapat yang kita dengar untuk itu, ada yang menyambut baik ada juga yang mengeluh kenapa harus terpisah-pisah begitu. Saya kira waktu itu memang belum siap secara sarana dan prasarana. Jadi, menurut pendapat saya, kondisi pemindahan itu ke Senayang memang belum bisa diterima banyak pihak terutama bagi pegawai-pegawai yang akan dipindahkan ke sana. Karena kondisi sarana-prasarananya terus cost-nya lebih besar. Untuk ke kantor saja mungkin kita memerlukan biyaberapa untuk sampai ke tujuan. Yang jelas sangat-sangat bisa diterima oleh banyak pihak karena mengingat daripada Kecamatan Senayang adalah merupakan salah sentraproduksi perikanan dan juga bahwa letak geografis daripada Kabupaten Lingga ini berpecah berpulau-pulau jadi kita mendekatkan daripada pelayanan perikanan dari Dinas kepada masyarakat nelayan.

Senayang sehingga merasa kondisi itu jadi mempersulit daerah tertentu. Contoh di Kecamatan Posek tentunya semakin lebih parah untuk berurusan atau menuju ke kantor di Senayang itu sendiri. Untuk di masyarakat nelayan sebenarnya tujuan ini untuk khusus di Kecamatan Senayang memang tercapai ada kemudahan masyarakat pulau-pulau untuk berurusan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Cuma informasi yang kita terima juga masyarakat di luar Kecamatan Senayang di Singkep dan di Daik sendiri juga menjadi problem ketika Dinas Kelautan dan Perikanan-nya dipindahkan ke Senayang. Tapi karena itu merupakan kebijakan Bupati pada periode itu memang tujuan yang hendak disampaikan oleh Bupati memang tercapai. Ada kemudahan bagi masyarakat pulau-pulau untuk berurusan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pihak yang tidak dapat menerima tujuan tersebut karena kemudahan akses dan pelayanan itu hanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang berada di Kecamatan Senayang. Sementara itu, masyarakat nelayan yang berada di kecamatan lain justru mengalami kesulitan menuju ke Senayang karena sulitnya transportasi dan memerlukan biaya yang besar dan itu hanya untuk menyelesaikan satu urusan, sementara mereka apabila berkunjung ke ibu kota kabupaten biasanya dapat menyelesaikan beberapa urusan sekaligus.

Karena rupanya kebiasaan mobilitas orang tidak saja kebutuhan seseorang itu terkadang hanya murni untuk pelayanan persoalan kelautan dan perikanan, tapi juga ada hal-hal lain yang terkait dengan kantor lain yang justru ada yang berpendapat kenapa tidak dikelompokkan terpusat di Daik sehingga mereka juga banyak kemudahan yang mereka dapatkan.

Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tidak mewakili kepentingan mayoritas dalam hal ini

masyarakat nelayan di Kabupaten Lingga. Jumlah RTP di Kecamatan Senayang sebanyak 3.010 jiwa atau dengan kata lain hanya mewakili 37,28% dari RTP di Kabupaten Lingga.

Pada kenyataannya ini kita harus membedakan pertama kalau kita bicara inikebanyakannya unsur politik ini. Kenapa saya sampaikan kebanyakan unsur politik, karena Kepala Daerah saat itu menginginkan Perikanan berada di Senayang karena unsur politik yang terkuatnya dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat yang lebih banyak. Masyarakat lebih banyak itu menginginkan tetap berada posisi di Daik. Kenapa di Daik? Karena masyarakat berpikiran sekali jalan dapat menempuh dua-tiga kegiatan lain tercapai. Karena pusat pemerintahan sebetulnya kan intinya ada di Daik, bukan di Senayang. Kalau tujuan, ya memang dengan keinginan yang lebih baik tapi tidak mayoritas karena di bagian lain juga memerlukan tempat yang mudah dijangkau sehingga daerah lain yang agak jauh mungkin kurang mendukung. Kita tidak melihat ada kepentingan mayoritas atau golongan yang kuat ya, tapi mungkin pimpinan saat itu melihat secara realitas di lapangan bahwa laut lebih luas di kawasan kecamatan kepulauan Senayang ini dibanding dengan kecamatan lain seperti Singkep, Kecamatan Lingga. Akhirnya adasemacam harapan bahwa dengan memindahkan ke kepulauan Senayang ini lebih dapat mendorong pertumbuhan mendorong kemudahan ternyata di lapangan memang seperti tadi, ada yang setuju ada juga yang tidak begitu setuju.

Sepertinya belum, sepertinya tidak mewakili oleh mayoritas. Karena harusnya kalau misal mewakili mayoritas mungkin dalam segi keilmuan akademik atau perencanaan harusnya sudah dikaji terlebih dahulu, apakah memenuhi aspek-aspek tertentu sehingga harus dipindahkan. Nah, itu juga ketika aspek perencanaan bersifat akademi pasti akan ada misalnya uji publik kemudian diminta juga partisipasi semua stakeholder yang berhubungan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, yang akan menggunakan atau yang akan memanfaatkan kehadiran daripada Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi, kalau dibilang mewakili mayoritas atau mewakili kepentingan mayoritas sepertinya belum karena memang kita ketahui bersama sepertinya pemindahan itu juga belum melakukan atau dilakukan perencanaan atau riset yang matang untuk hal itu. Iya, karena di sini mayoritas masyarakatnya adalah nelayan. Didukung golongan yang kuat dalam masyarakat itu saya kurang paham. Saya cumatahu di sini mayoritas semuanya hampir 90% itu masyarakatnya adalah nelayan. Memang secara umum Kabupaten Lingga mayoritas nelayan. Dan khusus di Kecamatan Senayang cenderung mayoritasnya 90% lebih memang nelayan. Tapi berkaitan dengan mayoritas ternyata dengan kondisi geografis yang sebelumnya Kecamatan Senayang itu sendiri pun tidak mendukung. Karena ada beberapa titik yang wilayahnya Senayang lebih cenderung untuk memudahkan jangkauannya masih tetap berkeinginan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan itu tetap berada di Daik Lingga. Jadi, memang kalau dibilang mayoritas memang nelayan tapi kalau berkaitan dengan jangkauan masih banyak yang tidak mendukung dalam arti kata bukan mayoritas berarti yang mendukung kantor Dinas Kelautan dan Perikanan itu berada di Senayang. Masyarakat nelayan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lingga, yaitu sebanyak 5063 jiwa atau 62,71% RTP di Kabupaten Lingga.

Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tidak ditetapkan dengan suatu cara tertentu. Tujuan yang hendak dicapai merupakan keinginan Bupati. Bukan keinginan masyarakat. Pada intinya, kalau kita kata-kata sebagai pegawai ya apalagi saya sebagai Kepala Dinas pada saat itu kalau dipikir koordinasi. Koordinasi ini memang agak sulit. Kalau kita bicara-bicara koordinasi pada saat itu. Koordinasi baik dengan OPD yang lain apalagi kita dengan kawan-kawan di Dewan. Kita ada Paripurna atau pertemuan-pertemuan Dewan kita agak sulit. Cuma karena ini mengingat terus terang saja ini banyak kepentingan-kepentingan yang sifatnya politik, pada saat itu kepentingan politiklah yang paling banyak dominan. Akhirnya karena salah satu dari pada Kepala Dinas sebagai

unsur pembantu Kepala Daerah, ikuti apa kemauan Kepala Daerah, walaupun kita akan memberikan gambaran kepada Kepala Daerah bahwa kemungkinan besar nanti sinergisitas agak kurang tercapai.

Kalau kita bicara cara tentunya lebih cenderung dari sisi pelayan sehingga apa yang diharapkan masyarakat terlayani baik itu pembinaan maupun sistem pelayanan urusan administrasi. Kaitan dengan pelayanan tentunya tujuan yang diharapkan tentu kepuasan. Berkaitan dengan kepuasan tentunya ada kemudahan, efektif dan sebagainya. Namun dengan kondisi yang terjadi malah sebaliknya mereka kecewa, waktu habis terbuang, biayayang besar. Maka berkaitan dengan cara yang telah kita terapkan dengankondisi jangkauan yang terlalu jauh sehingga cara itu sendiri tidak efektif maka dalam arti kata yang kita lakukan karena kita bisa membandingkan sebelumnya di Senayang dan beradanya di Daik maka cara yang kita terapkan di Senayang sehingga dianggap tidak efektif.

Waktu itu Pak Bupati Alias Wello berpikir inilah cara agar masyarakat nelayan di gugusan pulau-pulau Kecamatan Senayang ini terbantu untuk urusan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan. Karena memang jika masih tetap di Daik atau di Dabo maka biaya transportasi masyarakat untuk berurusan ke DKP itu memang besar biaya transportasi mereka bolak-balik belum lagi kalau urusannya tidak selesai mereka harus menginap lagi di Daik atau di Dabo. Tapi dengan dipindahkannya kantor Dinas Kelautan dan Perikanan ini sebagai fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat maka mayoritas masyarakat nelayan ini cukup terbantu. Jadi melihat dari cara menentukan tujuan yang hendak dicapai ini saya pikir inilah cara pemerintah melayani masyarakatnya. Pada tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tidak ditentukan untuk dicapai dalam jangka waktu berapa lama.

Kalau pemindahan ke Senayang itu sebetulnya sudah terlaksana. Cuma kenyataan sekarang kan akhirnya setelah ditinggal oleh Saya akhirnya daripada penempatan di Senayang akhirnya tidak produktif juga ujung-ujungnya. Karena banyak istilahnya pegawai-pegawai pada keberatan. Karena kita menempatkan seseorang itu ke suatu daerah seharusnya difasilitasi oleh fasilitas yang mumpuni. Tapi sampai saat ini kan fasilitas itu kan tidak terpenuhi. Ujung-ujungnya banyak cost atau biaya yang cukup besar untuk sampai ke tujuan. Kalau berapa lama, rasanya tidak mudah untuk menentukan. Namun, apabila memang kita lebih fokus di sana, mungkin akan memakan waktu yang tidak berapa lama. Namun, di sisi lain kita juga harus mengakomodir kepentingan-kepentingan dari daerah-daerah yang agak jauh. Jadi, mungkin perlu dipikir lagi lah bagaimana cara untuk merealisasikannya. Sejauh yang saya dengar dari teman-teman di Dinas Kelautan sendiri, soal jangka waktu ini tidak dapat dipastikan. Yang pasti memang yang saya dengar dari keluhan yang ada sejak awal ini memang agak sulit sehingga perlu dibuat ada pos tertentu pula di kota kabupaten yang juga mungkin bahwa banyak problem-problem di lapangan. Tapi pastinya saya tidak dapat memberikan jawaban karena keluhan-keluhan yang pernah saya dengar waktu itu.

Sulit saya memperkirakan karena letak lokasi. Memang mayoritas di Senayang ini hampir 90% adalah nelayan. Tapi di tempat-tempat yang lain juga itu kan ada juga mayoritas masyarakatnya yang nelayan. Jadi, kalau untuk menentukan waktu berapa lama saya tidak bisa menentukan. Kalau kaitan dengan jangka waktu ini mungkin tidak bisa saya jawab real berapa lamanya namun dalam arti kata ini memerlukan waktu dan dukungan pembangunan yang lain infrastruktur yang lain yang mendukungipun kalau semua pihak berkeinginan sama. Kalau hanya perikanan saja yang ada di Senayang dan tidak didukung dengan fasilitas atau program-program yang lain maka tentunya lamanya akan lebih panjang bahkan tidak berhasil tujuan yang akan dicapai. Itu dari sisi kondisi

real dilapangan bisa karena kita sudah melakukan itu sudah masuk tahun ketiga sampai detik ini juga belum kelihatan bahwa ini kemajuannya akan lebih memadai yang ada malah menurun.

Tujuan pemberdayaan masyarakat nelayan kita ini memang tidak serta merta jadi untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat nelayan ini karena memang butuh proses waktu dan butuh pembiayaan yang tidak sedikit sehingga memang pemberdayaan masyarakat nelayan kita mengangkat harkat perekonomian masyarakat nelayan ini memang perlu proses yang tidak cepatlah. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan nampak hasil dari manfaat dipindahkannya kantor Dinas Kelautan dan Perikanan ini di Senayang. Kalau dalam waktu dekat memang belum terlalu nampak tapi paling tidak dari sisi pengurusan administrasi dan segala macam itu sudah nampak bahwa manfaat dari didekatkannya kantor ini kepada masyarakat nelayan.

Tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang dalam penempatannya hanya memperhatikan kedudukan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai perangkat daerah yang berfungsi melayani masyarakat nelayan di wilayah yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan juga mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada usaha kecil pembudidayaan ikan dan usaha mikro-kecil pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Lingga. Sebagai perangkat daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan juga harus banyak berkoordinasi dengan perangkat daerah-perangkat daerah lainnya sebagian besar berada ibu kota kabupaten.

Sebetulnya kalau kita bicara masalah koordinasi, kan ada dua persepsi pada saat itu. Persepsi yang pertama adalah bagaimana kita bisa mendekati masyarakat nelayan yang ada di Kecamatan Senayang dan rencana pendekatan yang kedua adalah pada saat itu adalah Cabang Dinas Perikanan yang ada di Senayang. Jadi kemudian rencana yang ketiga kemarin itu adalah adanya Wilker (Wilayah Kerja) Karantina Ikan yang direncanakan berada di sekitar Kecamatan Senayang. Kenyataannya kan Wilker juga tidak berada di Kecamatan Senayang saat sekarang ini, Wilker berada di Dabo. Kalau kita melihat dari posisi pulau-pulau, hampir semua pulau yang ada di Lingga ini mayoritasnya banyak nelayan. Jadi, kalau kita lihat dari posisi, kantor itu memang harusnya berada di tengah sehingga dari setiap pelosok atau daerah-daerah tu bisa menjangkau lebih mudah gitu. Jadi, sebaiknya memang kantor itu berada di daerah yang posisinya sama-sama mudah dijangkau oleh semua tempat.

Kalau ini saya tidak begitu dapat memastikan apakah itu memperhitungkan kedudukan organisasi dan sebagainya, hanya saat itu lebih kepada pertimbangan secara umum saja bahwa setiap kantor dinas teknis itu harus didekatkan kepada objeknya yang di Kabupaten Lingga dilihat daripada mata pencaharian. Kalau Dinas Perikanan mungkin di kawasan kepulauan Senayang, kalau Dinas Kependudukan itu di Dabo, begitu juga Dinas Kesehatan. Mungkin pertimbangannya seperti itu. Secara pelayanan tadi mungkin fifty-fifty lah. Tapi untuk kedudukan organisasi pendapat saya mungkin lebih baik dalam satu kompleks, bisa terintegrasi dengan dinas-dinas lain, badan, OPD-OPD lain. Supaya mungkin koordinasi lebih baik.

Niat dari awal Pak Bupati tentunya pasti ada orientasi karena salah satu menjawab kaitan dengan layanan yang dianggap selama ini pembangunandi wilayah Senayang itu tidak sebanding dengan perkembangan pembangunan di wilayah kecamatan yang lainnya. Jadi, pemahaman beliau dengan beradanya OPD di Senayang sehingga akan lebih memudahkan karena Senayang bagian mayoritas nelayan pemahaman beliau akan lebih dekat dengan masyarakat lebih dekat di tengah-tengah kondisi memang mayoritas nelayan. Jadi, pemahaman orientasi ke depan karena itu sudah perintah dan diharapkan ada suatu kemajuan orientasi kita berharap makasampai saat ini masih bertahan bahwa ini kantor tetap di sana berbagai upaya permasalahan yang dihadapi namun

memang untuk lebih maju lebih yang kita harapkan tentunya masih jauh dari harapan. Itu saja kendalanya.

Orientasi Pak Bupati Alias Wello pada waktu itu memang wilayah gugusan Kecamatan Senayang ini menjadi prioritas pengembangan sektor Perikanan dan Kelautan. Karena kalau kita ingin mengembangkan sektor perikanan dan berdekatan dengan pasar di Tanjung Pinang, Batam, dan Singapura memang wilayah inilah yang bisa mempercepat program pengembangan di sektor perikanan dan kelautan. Karena kalau rentang jarak dengan pasarnya yang di Tanjung Pinang, di Batam, dan di Singapur maka wilayah inilah yang di dalam peta wilayah Kabupaten Lingga wilayah gugusan Kecamatan Senayang inilah yang berdekatan. Itulah yang menjadi keinginan tujuan Pak Bupati memandang supaya kantor DKP ini segera dipindahkan ke Senayang.

Kecukupan Sumberdaya yang Tersedia

Waktu yang diperlukan cukup tersedia karena pada dasarnya tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang itu cukup sederhana. Waktu yang tersedia itu adalah sebanyak waktu 1 periode kepemimpinan Bupati pada waktu itu.

Kalau mengingat waktu, pertama ujungnya adalah saya pikir pegawai ya. Pegawai mulai dari Daik karena sebagian besar pegawai DKP ini DKP ke Senayang sebagian besar berdomisili di Daik, bukan berdomisili ada di Senayang. Jadi, mau tidak mau, dia mobilitas dari Daik ke Senayang butuh banyak waktu, butuh banyak biaya, saya pikir itu kurang efektif akhir ujung-ujungnya. Kecuali, kalau memang itu pegawai itu hidup secara keseluruhan itu pegawainya berada pada posisi di Senayang. Atau bisa juga pegawai kita alokasikan akomodasi dan tempat penginapan ada di Senayang. Tapi sampai saat ini kenyataan itu tidak terjadi seperti itu. Itu yang membikin berat daripada kawan-kawan karyawan yang ada di DKP. Itu waktu itu tadi berdasarkan sumber daya manusianya pula. Jadi, kalau sumber daya manusianya memang bekerja dengan baik atau sesuai dengan target-target mungkin bisa dicapai dengan mudah, jadi tidak memerlukan waktu yang lama. Kalau soal ini mungkin menurut saya, belum cukup. Dengan kondisi sekarang sudah 4 tahun, progresnya belum menampakkan perkembangan dengan waktu yang selama ini berjalan. Saya kira mungkin perlu digesalah kayaknya ke depannya. Supaya tadi untuk mencapai tujuan tadi kalau nggak digesalah kayaknya kita gini-gini saja. Jadi sia-sia. Pindahan yang sekian tahun tapi tidak berjalan optimal/maksimal. Relatif kembali lagi daripada keseriusan pemerintah Kabupaten Lingga sendiri atau mungkin lebih tepatnya daripada Kepala Daerah karena yang namanya tujuan sumber daya yang tersedia ini semuanya sebenarnya sudah diatur sendiri oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku baik peraturan dari pusat ataupun dari tingkat provinsi atau kabupaten itu sendiri.

Kalau di sisi waktu tentunya memang dalam seiring berjalan waktu yang telah kita lewati juga sampai saat ini perkembangannya juga tidak begitu signifikanlah. Jadi, walaupun target beliau hanya beberapa tahun ternyata dengan kondisi di lapangan dan kondisi wilayah yang sulit sehingga batas waktu atau yang telah diharapkan memang agak kesulitan kaitan dengan target untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Jadi, walaupun kita telah berjalan masuk tahun ketiga kalau dibilang waktunya singkat lah lumayan panjang. Namun dengan keterbatasan dengan posisi yang telah ditetapkan di Senayang pusat OPD kita ini nampaknya belum nampak hasil tujuan yang akan dicapai.

Kalau waktu saya pikir tersedia karena memang proses waktunya memang tidak 1-2 hari. Proses waktu untuk mewujudkan tujuan ini melalui proses waktu yang panjang juga seperti yang sampaikan tadi tidak proses yang pendek mungkin 1 atau 2 tahun ke depan apa yang diinginkan atau dimaksudkan oleh Pak Bupati pada waktu itu insya Allah mungkin akan tercapai. Seperti dulu

beliau ingin wilayah itu ada kemudahan masyarakat nelayan di sektor pembelian BBM, pabrik es, pelabuhan ekspor-impor perikanan, cok imigrasi perikanan dan segala macam untuk ekspor ikan ke luar mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan insya Allah akan terealisasi.

Sumber daya manusia yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang cukup tersedia secara kuantitas dan kualitas. Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga pada tahun 2017 sebanyak 20 orang, 5 orang berdomisili di Kecamatan Senayang, dan 3 di antaranya berlatar pendidikan di bidang perikanan.

Kalau dari sumber daya SDM-nya, baik kualitas maupun kuantitas, saya pikir belum mencukupi. Karena terbagi dua, pertama di Senayang, satu lagi berada posisi di Daik. Itu sangat-sangat sulit itu. Ujung-ujungnya di koordinasi, nanti sebagai Kepala pun agak sulit melakukan koordinasi. Baik koordinasi kepada pejabat yang ada dalam artian pejabat strukturalnya maupun kepada karyawannya. Itu dari SDM baik kualitas dan kuantitas saya pikir belum mencukupilah itu.

Kalau sumber daya manusianya cukup walaupun tidak pas untuk kepentingan yang sebenarnya. Namun, karena lokasinya tu jauh, maka dalam perjalanan yang panjangnya cukup lama itu, jadi sumber daya manusianya sesampainya di kantor sudah stress menghadapi perjalanan itu sehingga mungkin semangat atau keinginan untuk bekerja yang lebih baik itu menjadi berkurang sehingga secara kuantitas mungkin cukup tapi secara kualitas kemampuannya jadi menurun.

Menyangkut SDM juga belum cukup, kualitas dan kuantitasnya juga belum cukup. Saya kira kalau secara kualitas sudah cukup. Cuma, dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya manusia yang telah tersedia sekarang, itu kan rata-rata domisilinya tidak di Senayang dan rata-rata sudah berkeluarga. Jadi untuk maksimalnya ke sana pelayanan ke sana kayaknya belum tercapai karena memang kondisinya dan sumber daya manusianya. Mungkin tidak bisa fokus ke sana sedangkan pelayanan lebih banyak di ibu kota kabupaten.

Mungkin Dinas Perikanan banyak tenaga-tenaga ahli yang jelas dari dengan background sarjana-sarjana perikanan yang mungkin banyak tinggal kita memenej daripada sumber daya manusia itu sendiri dan mengarahkan serta membina daripada aparatur-aparatur yang ada di Dinas Perikanan itu sendiri. Saya rasa belum tersedia cukup baik. Kalau misalnya kuantitas bisa jadi sudah memenuhi aspek-aspek tertentu dan mencukupi. Tetapi secara kualitas mungkin belum bisa karena memang perlu tahapan-tahapan lebih lanjut meningkatkan kapasitas atau kompetensi masing-masing sumber daya untuk mampu mewujudkan tujuan tersebut misalnya mampu mengakomodir kepentingan nelayan. Selain itu kenapa saya bilang harus meningkatkan kapasitas dan kompetensi karena seperti yang kita ketahui kantor Dinas Kelautan dan Perikanan di Senayang itu tidak sama dengan kantor yang ada di ibu kota Kabupaten seperti di Daik Lingga. Jadi, kapasitas sumber daya manusianya perlu ditingkatkan bagaimana mereka perlu beradaptasi dengan lingkungan yang baru, bagaimana perlu mengkondisikan cara kerja, kemudian harus beradaptasi dengan bentuk- bentuk kegiatan administrasi yang tidak dapat dilakukan secara efektif dan efisien sebagaimana ketika berada di ibu kota kabupaten atau di Daik Lingga. Jadi, makanya penting untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi dari sumber daya manusia. Jadi, secara kuantitas cukup tersedia tetapi secara kualitas belum tersedia dengan baik.

Cukup tersedia baik secara kualitas maupun kuantitas. Cuma di sini karena lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan kan sudah dipindahkan ke Kecamatan Senayang, yang sangat disayangkan menurut saya jumlah seharusnya karena lokasinya sudah di Kecamatan Senayang mayoritas pegawainya sumber daya manusia itu lebih banyak di Senayang. Tapi faktanya hanya sekitar 10-20%

itu sumber daya (manusia)nya dari Kecamatan Senayang dan yang lain dari luar Kecamatan Senayang. Jadi, untuk mewujudkan yang hendak dicapai itu agak sulit.

Berkaitan dengan SDM kalau bicara kaitan dengan bahasa kita tantangan ke depan khusus untuk di sektor perikanan itu sendiri kita memang minim kalau memang berbicara kaitan dengan background pendidikanlah atau praktisi jiwa yang berkaitan dengan perikanan itu sendiri. Di Kabupaten Lingga sendiri memang kaitan dengan khusus untuk di OPD kita hanya terisi untuk pendidikan perikanan sendiri yang mewakili jabatan tertentu itu terisinya hanya 30% yang ASN-nya yang pegawai selebihnya PTT THL itu pun bahkan hanya 30% yang betul-betul pendidikannya perikanan. Kita juga tetap berupaya walaupun bukan background pendidikan didampingi mempelajari walaupun bukan perikanan namun berkaitan dengan tuntutan kerja walaupun tingkat pendidikannya masih terbatas kita masih merekrut THL PTT yang bukan sarjana tapi masih perikanan. Tapi memang secara menyeluruh kaitan dengan SDM tentunya terbatas. Jadi belum sesuai dengan keinginan untuk menjawab kaitan dengan pekerjaan kita sendiri karena kita merupakan OPD teknis karena sebagian besar itu pendampingan pembinaan dan sebagainya lebih cenderung ke teknis pelayanan kita hanya sedikit. Pelayan kita hanya sekedar berkaitan dengan pelayanan administrasi dan rekomendasi minyak penggunaan minyak BBM subsidi untuk nelayan selebihnya lebih cenderung ke teknis. Jadi berkaitan dengan sumber daya manusia itu sendiri tentunya terbatas.

Sebetulnya kalau di DKP itu SOP itu sudah jalan sebetulnya. Sudah jalan. Cuma yang terkendala ini bukan di SOP-nya. Tujuan yang hendak dicapai itu sudah hampir mendekati. Cuma permasalahannya karena faktor lokasinya ini. Lokasi yang membuat terlalu jauh, jadi banyak butuh energi, butuh biaya yang dikeluarkan. Ujung-ujungnya tujuan yang hendak dicapai akhirnya tidak tercapai kalau menurut saya. Kalau dia nampaknya tidak punya sistem yang khusus atau metode yang khusus, berjalan seperti biasa adanya. Namun, kalau memang kita menghadapi hal-hal setelah pemindahan itu adalah masalah seperti kemampuan pegawainya itu sudah mengalami stress dulu di perjalanan, maka mungkin perlu dipikirkan lagi cara atau sistem atau metode yang bagaimana supaya pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik.¹⁷⁵ Ini juga belum, menurut saya ya. Kayaknya belum tersistem, belum mantaplah. Memang secara kualitas sumber daya manusianya sudah, cuma jumlah dan tadi masalah domisili dan pelayanan. Karena memang selama ini terfokus ke pelayanannya tidak di Senayang dan memang sebagian besar mereka lebih efektif bekerja di ibukota kabupaten, berkoordinasi dengan dinas-dinas lain seperti Bappeda atau dinas-dinas yang terkait dengan perikanan lebih bagus kayaknya/lebih baik.

Kembali kepada pemikir-pemikir Pemerintah Kabupaten Lingga mungkin dalam hal ini ada di bagian perencanaan Bappeda karena sistem dan metode ini dalam aturan yang berlaku sudah jelas baik rencana kerja maupun rencana jangka panjang tergambar di dalam RPJM Kabupaten Lingga. Menurut saya belum. Karena tadi, karena didasari dengan atau belum cukup dokumen lengkap dokumen perencanaan atau studi kelayakan terhadap pemindahan kantor ini mengakibatkan kita tidak apa sistem atau metode-metode yang kita perlukan harus kita lakukan dan yang harus kita capai sehingga tujuan dari pemindahan kantor Dinas Kelautan dan Perikanan ini dapat terpenuhi dengan baik. Jadi, menurut saya belum tersedia dengan baik sistem atau metode yang diperlukan.

Sudah. Sistem atau metode yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai itu sudah. Tapi, menurut saya tidak berjalan. Kalau sistem dan metode sebelumnya karena kita berkedudukan di Kabupaten pusat ibu kota berkaitan dengan sarana prasarana yang sedikit memadai sementara setelah dipindahkan ke Senayang tentunya akan sedikit berbeda karena terbatas sarana itu sendiri untuk memudahkan kita kerja. Kalau kaitan dengan metode itu sama cuma memang untuk

mencapai tujuan karena sistem itu terganggu karena sarana itu terbatas maka dengan sendirinya tujuan yang akan dicapai itu juga akan terganggu dan terhambat. Bisa jadi metodanya kita pertimbangkan lagi metodanya. Bisa jadi seperti contoh ada pola jempit bola. Cuma tentunya memerlukan biaya yang lebih besar lagi. Kita geografisnya pulau-pulau dan letaknya jauh-jauh. Maka memang perlu pertimbangan kembali kaitan dengan kedudukan Dinas Kelautan dan Perikanan berada di Senayang.

Nah sistem ini yang belum nampak atau metode yang belum nampak karena memang baru pada tahap pindah kantor DKP tapi sistem dan metode supaya tujuan yang hendak dicapai ini yang belum nampak sampai hari ini. Seharusnya kita lihat dari pembagian kue pembangunan di Dinas Kelautan dan Perikanan termasuk masih kecil untuk dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat nelayannya makanya saya sampaikan bahwa sistemnya yang masih belum nampak. Pemerintah ingin membantu masyarakat nelayan di seputar pulau-pulau di Kecamatan Senayang tapi tidak belum maksimal artinya sudah dilakukan hanya belum dengan sistem yang maksimal. Dana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tidak cukup tersedia. Tujuan tersebut tidak menjadi sebuah program atau kegiatan yang teranggarkan dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah.

Saya pikir selama kemarin kepindahan dari Daik ke Senayang dana untuk kepindahan hampir tidak tercukupi. Itu banyak kita plotting-plotting anggaran dari kegiatan yang lain. Itu karena untuk kepindahan kemarin kan tidak diplotkan pembiayaannya. Jadi kita plotting-plotting anggaran ke kegiatan lain, kita comot-comot untuk melakukan pemindahan seperti itu. Jadi, intinya untuk masalah pembiayaan anggaran untuk mencapai tujuan ini masih kuranglah.¹⁸³ Berkaitan dengan dana, saya rasa dengan makin jauhnya berada tidak pada posisi yang strategis, maka dana juga akan menjadi bertambah diperlukan. Maka untuk mewujudkan ini, mungkin dengan dana yang ada tidak dapat mengcover semua kebutuhan. Mungkin dananya menjadi lebih banyak untuk mencapai tujuan setelah dipindah.

Kaitan dengan logistik dengan kondisi kedudukan Dinas di Senayang ini otomatis walaupun tersedia itu memerlukan waktu dan biaya. Dengan kondisi waktu dan biaya dan logistik kita juga yang terbatas itu akan lebih bertambah parah dalam mencapai tujuan. Namun berbagai apapun kondisi lapangan karena kita bagian dari pelayanan masyarakat tentunya walaupun kondisi logistik yang terbatas itu kita manfaatkan. Cuma mungkin hasilnya tidak maksimal. Jadi, logistik yang terbatas geografis yang sulit itu akan mengganggu kelancaran untuk mencapai tujuan itu sendiri.

Logistik ini juga masih terlalu minim. Karena memang saya amati dari tahun pertama Pak Alias Wello sampai ke periode Bupati Pak Nizar memang alokasi dana untuk pengembangan sektor perikanan ini mulai dari Tangkap maupun Budidayanya sangat minim otomatis juga logistik yang tersedia juga minim. Seharusnya Dinas Kelautan dan Perikanan diberi alokasi dana yang lebih karena memang mayoritas masyarakat Kabupaten Lingga yang ada di pulau-pulau ini berprofesi sebagai nelayan. Jadi ini yang belum terwujud dengan baik. Logistiknya kan mengikut dari dana

Informasi sebetulnya pada awalnya memang cukup mengagetkan. DKP harus pindah ke Senayang walaupun itu istilahnya memang sudah daripada janji politik Pak Bupati. Cuma pemikiran saya pada saat itu kenapa kita harus secepat itu karena kita belum melakukan kajian-kajian akademis, untung-ruginya bagaimana, peluang-peluang yang kita lakukan di sana bagaimana. Jadi, pada intinya informasi itu masih sumirilah. Pada awalnya memang di kantor atau di orang Perikanan yang cukup mengerti informasi yang disampaikan. Tapi kalau untuk secara keseluruhan termasuk ke masyarakatnya, saya rasa belum semuanya sampai. Hanya ada beberapa yang bisa mengerti apa maksud dan tujuan daripada pemindahan tersebut.

Kaitan dengan informasi yang hendak kita capai ini memang karena kondisinya walaupun kita pulau jauh terpencil dan masyarakat pendidikan terbatas tapi kaitan dengan informasi cukup memadai, informasi dari media atau penyebaran kegiatan kita di sistem pelayanan dengan kondisi kemajuan media saat ini itu sudah cukup memadai. Sehingga apapun bentuk kegiatan permasalahan yang dihadapi di lapangan itu akan kondisi sekarang sudah cukup, lebih cepat lebih akurat dan kita juga dengan informasi yang ada itu akan lebih mudah untuk melakukan langkah-langkah mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang ada. Kaitan dengan pelayanan itu sendiri dengan informasi yang terbentuk dengan kondisi sarana informasi yang tersedia juga sangat membantu. Jadi, kalau kita bandingkan daerah yang tidak begitu sulit memang berbeda, kalau informasi-informasi yang kita sampaikan atau kita umumkan cukup lumayanlah dan berfungsi walaupun tidak sebagus daerah yang lain.²⁰⁸ Kalau informasi tersedia dengan baik karena walaupun kantor DKP-nya di Kecamatan Senayang tapi informasinya ke Pemerintah tetap tercapai tetap dapat diakses dengan baik apalagi zaman informasi IT sekarang ini. Jadi tidak menjadi kendala SDM kawan-kawan di DKP untuk memenuhi informasi tentang kelautan dan perikanan di Kabupaten Lingga.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan pemindahan lokasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga ke Kecamatan Senayang belum mendukung pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan, karena sebagian besar sumber daya tidak cukup tersedia, yaitu sistem, dana, logistik, dan informasi. Yang relatif cukup tersedia hanya waktu dan sumber daya manusia. Selain itu juga, tujuan yang hendak dicapai yaitu memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat nelayan di Kecamatan Senayang tidak dapat diterima oleh banyak pihak, tidak mewakili mayoritas, tidak ditetapkan dengan cara tertentu, tidak ditentukan jangka waktu pencapaiannya, tidak memperhitungkan kedudukan organisasi secara menyeluruh, dan tidak berdasarkan pola pikir yang runtun dan mudah dipahami langkah-langkah pencapaiannya. Dengan kata lain, tujuan yang hendak dicapai tidak memenuhi kriteria sebagai tujuan yang baik.

REFERENCES

Book

- Budiardjo, Miriam. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Emzir. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Herdiansyah, Haris. (2013). *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Labolo, Muhadam. (2017). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Lubis, M. Solly. (2007). *Kebijakan Publik*. Bandung: Mandar Maju.

- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung:Alfabeta.
- Munaf, Yusri. (2015). *Hukum Adminstrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh. Nawawi, Zaidan. (2015). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. (2014). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nugroho, Riant. (2018). *Kebijakan Publik: Perumusan Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rauf, Rahyunir. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Pekanbaru: Zanafa.
- Setiyono, Budi. (2014). *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta:CAPS.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suntoro, Irawan dan Hasan Hariri. (2015). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syafiie, Inu Kencana. (2014). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara. Widodo, Joko. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Kreatif.

Journal

- Bintari, A. & Pandiangan L. *Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di Provinsi DKI Jakarta*. Jurnal Ilmu Pemerintahan ISSN 2442-5958 E-ISSN 2540-8674 220 CosmoGov, Vol.2 No.2, Oktober 2016.
- Doni, D., Yogya, M. A., Zainal, Z., Riauan, M. A., Purwati, A. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Management of Market Pelita Retribution In Bangko District In Increasing Original Revenue of Rokan Hilir Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 41). European Alliance for Innovation.
- Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah tetang Rencana Pembelajaran Tatap Muka di Media Online CNN Indonesia. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 9(2), 167-184.
- Ispik, A., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. *Pekanbaru City*.
- Kadarisman, Muh et al. *Formulasi Kebijakan Sistem Transportasi Laut*. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog) ISSN 2355-4721- Vol. 03 No. 2, Juli 2016: 161
- Kanaha, Ibnu. *Kebijakan Pemerintah Daerah Pindahan Pasar Rawajaya ke Pasar Wosia (Studi Kasus Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara)*. As Siyasa, Vol. 2, No. 2, November 2017 ISSN: 2549-1865.
- Misna, Andi. *Formulasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kandolo Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Administrasi Negara, 3 (2) 2015 : 521 - 533 ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip- unmul.ac.id © Copyright 2015.
- Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. *Editor*, 12, 219.

- Thoriq, M. Isa & Samsudin, M. *Dilema Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Pasar Blauran II Kota Salatiga*. Gema Publica Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik ISSN Cetak 2460-9714 ISSN Online 2548-1363 Vol3, Nomor 2, Oktober 2018: 76.
- Riauan, M. A. I. (2013). Penggunaan Teknologi Komunikasi dalam Penerapan Good Governance. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 2(2), 102-107.
- Riauan, M. A. I., & Aziz, A. (2019). Professional Gamer: The Meaning on 'Point Blank Online' Play. *Jurnal The Messenger*, 11(1), 18-26.
- Riauan, M. A. I. (2016). Figur Politik Calon Walikota Pekanbaru Septina Primawati Rusli dan Erizal Muluk Pada Pemilu Kota Pekanbaru 2011. *Medium*, 4(2).
- Riauan, M. A. I. (2012). Studi Komparatif Aktivitas Humas Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. *Chevron Pacific Indonesia*. *Medium*, 1(1).
- Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1), 49-62.
- Satria, A., Yogya, M. A., & Wedayanti, M. D. (2021, January). Strategy of Tourism and Culture Office in Development of Cultural Heritage at Kuantan Singingi Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 282). European Alliance for Innovation.
- Subhayano, T., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency.
- Wicaksono, A. (2022, April). Peatlands Restoration Policies in Indonesia: Success or Failure?. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 995, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.
- Yogya, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
- Zainal, Z., & Nurdasanah Putri, F. (2021). Government Management in Village-Owned Enterprises in Increasing Village Original Income In Kampar District.